



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

UNIT KERJA : DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MASYKUR**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **210917**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

3.095.051.600

1. Tanah Seluas 831 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 3.696.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 371 m2/90 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 880 m2/400 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 59 m2/59 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 117.495.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m2/306 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 368.642.000
6. Tanah Seluas 19.747 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 33.569.900
7. Tanah Seluas 16.830 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 28.611.000
8. Tanah Seluas 19.125 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 32.512.500
9. Tanah Seluas 17.956 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 30.525.200
10. Tanah Seluas 19.006 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
11. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,



HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

12. Tanah Seluas 1.881 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

13. Tanah Seluas 421 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

14. Tanah Seluas 359 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

15. Tanah Seluas 9.102 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

16. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/120 m2 di KAB / KOTA

KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

17. Tanah dan Bangunan Seluas 4.723 m2/332 m2 di KAB / KOTA

KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

18. Tanah Seluas 14.085 m2 di KAB / KOTA NATUNA, HASIL SENDIRI

Rp. 100.000.000

19. Tanah Seluas 1.753 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

20. Tanah Seluas 685 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

21. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

22. Tanah Seluas 9.945 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000

23. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

24. Tanah dan Bangunan Seluas 430 m2/150 m2 di KAB / KOTA

KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

25. Tanah Seluas 4.718 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN ANAMBAS,

HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

23.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI

Rp. 10.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI

Rp. 10.000.000

3. MOTOR, KAISAR/TRISEDA SEPEDA MOTOR RODA 3 Tahun

2017, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	750.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.890.964
F. HARTA LAINNYA	Rp.	3.000.000
Sub Total	Rp.	3.888.942.564
III. HUTANG	Rp.	2.021.864.683
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.867.077.881

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.